



# RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN)



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



TAHUN 2017 - 2021

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kota Batam sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam 2016 - 2021 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 Kota Batam.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam. Penyusunan Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi Bidang terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Batam, Desember 2018

**Kepala Dinas Perhubungan**



RUSTAM EFENDI, SE., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660402 198807 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ...</b>	<b>15</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.2. Sumber Daya .....	31
2.3. Kinerja Pelayanan .....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi .....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	44
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	47
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>49</b>
<b>PENUTUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....	32
2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	33
3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan .....	47
5.1. Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan .....	48
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam (RENSTRA) Tahun 2016-2021 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 8 Tahun 2016. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Batam 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

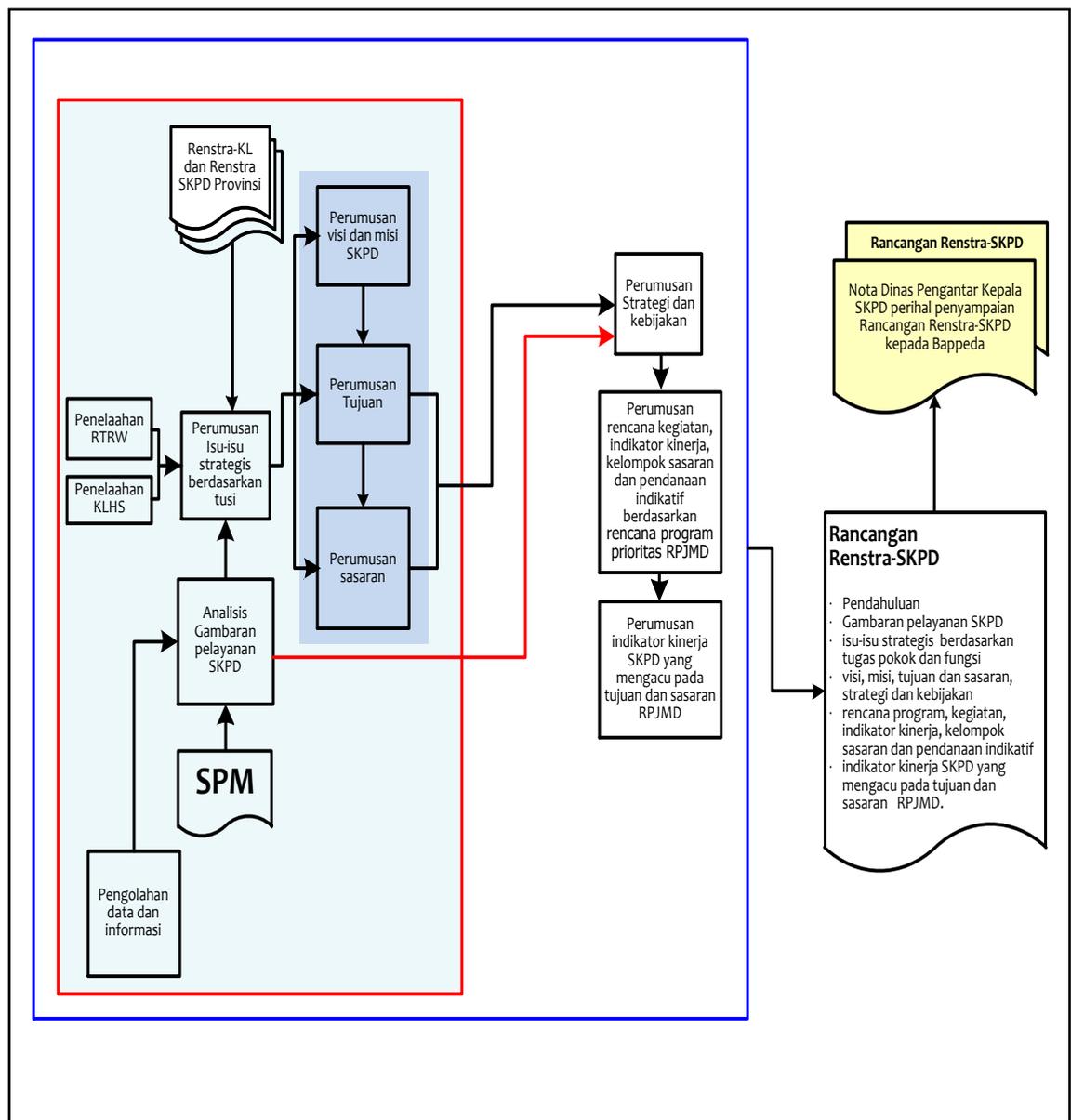
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam disusun dengan melalui berbagai proses, mulai dari penyusunan RPJMD Kota Batam, merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya menyusun program sebagai panjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus merujuk kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, kementerian perhubungan tahun 2015-2019 akan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan peningkatan kapasitas transportasi dengan mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses pada masyarakat pengguna jasa transportasi, termasuk distribusi barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mewujudkan pembangunan sektor perhubungan antara lain, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri.

**RPJMD □ RENSTRA OPD □ RENJA OPD □ RKA OPD □ DPA OPD**



Gambar 1-1  
Alur Penulisan Renstra OPD

## 1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam disusun berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A );
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44);
  27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11)
  28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12).
  29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 56 );
  30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 58 );
  31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67 );
  32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan renstra yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Batam ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kota Batam serta bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

Dari tujuan Renstra pada umumnya yang tertulis di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kota Batam dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Batam yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Batam

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra OPD) Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2016 – 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan dengan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SPD

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 2016-2019,

mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2016-2019, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator yang telah ditetapkan dalam Ranwal Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### 3.5 Penentuan Isu-isu Startegis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam; Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah:

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

##### **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam terdiri dari:

- (1) Tipologi Dinas Perhubungan berbentuk Dinas Tipe A
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat.
  - c. Bidang-bidang.
  - d. Unit Pelaksana Teknis.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.2.1 Kepala Dinas Perhubungan**

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan jalan, Bidang Prasarana Perhubungan, Bidang Angkutan Laut dan Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal.

- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.
- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Perhubungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas
- k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Perhubungan.

- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas.
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang.
- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
- p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas
- q. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas
- r. menyelenggarakan proses perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Prasarana Perhubungan, Bidang Laut sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

#### **2.1.2.2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas
- b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas
- c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas

- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
- e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas.
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- i. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.
- j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.

- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup kesekretariatan.
- l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- m. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sekretariat.
- n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
- o. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### **2.1.2.3 Bidang Lalu Lintas**

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas.

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Lalu Lintas
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Lalu Lintas
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Merumuskan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kota.
- f. Melaksanakan penyusunan jaringan jalan tertib pemanfaatan jalan kota.
- g. Melaksanakan penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan kota;
- h. merumuskan penetapan lokasi parkir.
- i. melaksanakan pengawasan penertiban lalu lintas dan angkutan;
- j. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Lalu Lintas.
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang Lalu Lintas.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

- m. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- n. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Lalu Lintas
- o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- b. Seksi keselamatan lalu lintas
- c. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas

#### **2.1.2.4 Bidang Angkutan Jalan**

Bidang Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Angkutan Jalan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Angkutan Jalan
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Angkutan Jalan.
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merumuskan jaringan pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, tidak dalam trayek dan pelayanan angkutan khusus;
- f. merumuskan jaringan pelayanan pengangkutan barang dengan kendaraan mobil barang umum, barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
- g. melaksanakan pelayanan penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum, Surat Dispensasi Penggunaan Jalan dan Izin Insidental.
- h. melaksanakan inventarisasi dan pendataan serta penyusunan laporan angkutan jalan yang terdiri dari mobil angkutan barang dan penumpang;
- i. merencanakan penetapan lokasi terminal penumpang dan barang serta tempat bongkar muat barang dan pengoperasiannya;
- j. merumuskan struktur dan golongan tarif angkutan umum;
- k. merumuskan tatacara pengangkutan penumpang dan barang;
- l. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan pengemudi kendaraan bermotor;

- m. merumuskan penentuan jumlah kendaraan angkutan umum dengan tingkat mobilitas masyarakat dan kapasitas jalan yang tersedia;
- n. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Angkutan Jalan.
- o. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- p. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Angkutan Jalan
- q. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Angkutan Jalan
- s. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas di atas, Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang
- b. Seksi Angkutan Barang
- c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

#### **2.1.2.5 Bidang Prasarana Perhubungan**

Bidang Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Perencanaan Teknis, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Prasarana Perhubungan.

- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perencanaan Teknis, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Prasarana Perhubungan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Teknis, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Prasarana Perhubungan.
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Teknis, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Prasarana Perhubungan.

Kepala Bidang Prasarana Perhubungan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Prasarana Perhubungan
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Prasarana Perhubungan
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. merumuskan rencana kebutuhan prasarana perhubungan.
- f. Melaksanakan kajian teknis prasarana perhubungan.
- g. Melaksanakan penyiapan lokasi pembangunan prasarana perhubungan.
- h. Melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan.
- i. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Prasarana Perhubungan.
- j. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.

- k. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Prasarana Perhubungan
- l. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Bidang Prasarana Perhubungan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis
- b. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Seksi Prasarana Angkutan Laut

#### **2.1.2.6 Bidang Laut**

Bidang Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program lingkup Kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang Kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.

- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanKepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.

Kepala Bidang Laut mempunyai uraian tugas:

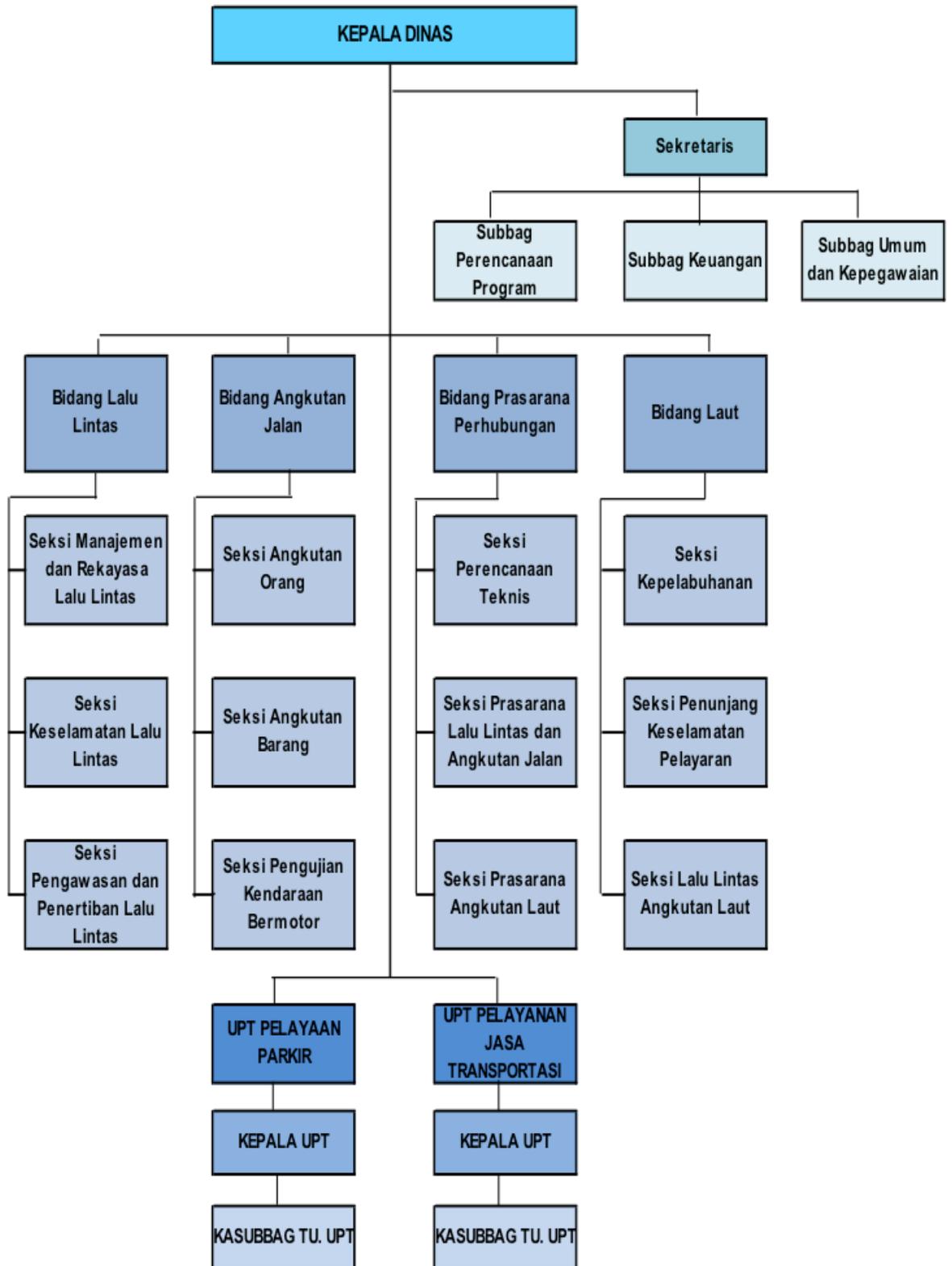
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan diBidang Laut yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Laut
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Laut
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi dibidang perhubungan laut.
- f. menyusun rencana induk pelabuhan lokal;
- g. mengelola trayek angkutan laut perintis Kota Batam;
- h. melaksanakan penetapan lokasi pembangunan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal Kota Batam;
- i. melaksanakan penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kota Batam;
- j. menyelenggarakan penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
- k. menyusun penetapan bersama tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota;
- l. melaksanakan pengukuran dan pendaftaran kapal isi kotor/lebih kecil dari GT.7;
- m. melaksanakan penertiban Surat Tanda Kebangsaan kapal isi kotor/lebih kecil dari GT.7;
- n. melaksanakan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;

- o. melaksanakan penertiban pelabuhan dan pencegahan penanggulangan pencemaran;
- p. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Perhubungan Laut.
- q. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan.
- r. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Laut
- s. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Laut
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas di atas, Bidang Laut terdiri dari :

- a. Seksi Kepelabuhanan
- b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran
- c. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM  
TAHUN 2017**



## 2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Batam yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi adalah:

NO	GOLONGAN	LK	PR	JUMLAH
1	Golongan IV / c	1	-	1
2	Golongan IV / b	1	-	1
3	Golongan IV / a	2	-	2
4	Golongan III / d	13	2	15
5	Golongan III / c	4	5	9
6	Golongan III / b	12	4	16
7	Golongan III / a	11	-	11
8	Golongan II / d	2	2	4
9	Golongan II / c	11	2	13
10	Golongan II / b	7	-	7
11	Golongan II / a	5	1	6
12	Golongan I / d	-	-	-
13	Golongan I / c	1	-	1
14	Golongan I / b	1	-	1
15	Golongan I / a	-	-	-
16	THD	10	3	13
17	THL	31	9	40
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>	<b>28</b>	<b>140</b>

NO	UNIT KERJA	PNS	THD & THL	JUMLAH
1	Sekretariat	14	12	26
2	Bidang Lalu Lintas	18	11	29
3	Bidang Angkutan Jalan	19	12	31
4	Bidang Prasarana Perhubungan	6	2	8
5	Bidang Laut	15	3	18
6	UPTD Parkir	8	13	21
7	UPTD Pelayanan Transportasi	7	0	7
<b>JUMLAH</b>		<b>87</b>	<b>53</b>	<b>140</b>

## 2.3 Kinerja Pelayanan

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kota Batam**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase titik Parkir yang sudah dikelola	47%	50%	69%	81%	83%	87%	47%	50%	83%	100%	100%	121%
4	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	80%	80%	85%	85%	90%	90%	-	36%	34%	0%	45%	40%
5	Persentase layanan angkutan darat dan laut	40%	50%	52%	56%	60%	65%	24%	46%	52%	60%	92%	100%
6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	40%	51%	56%	59%	65%	65%	40%	60%	61%	100%	118%	109%
7	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	20%	25%	30%	40%	50%	60%	-	19%	20%	-	76%	67%
8	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	70%	75%	80%	85%	90%	100%	-	33%	50%	-	44%	63%
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota	44%	78%	78%	89%	100%	100%	67%	50%	100%	152%	64%	128%

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kota Batam**

No	Urusan/ Program/ Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>												
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,214,746,562	4,165,000,000	4,582,120,000	4,777,680,000	5,000,000,000	5,500,000,000	2,749,439,709	3,738,285,506	3,110,529,011	124.14%	89.75%	67.88%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	352,692,752	4,269,930,000	4,696,920,000	1,861,470,000	-	-	1,520,276,850	1,599,809,750	1,675,466,122	431.05%	37.47%	35.67%
3	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	2,150,000,000	2,300,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
4	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	350,000,000	400,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas</b>												
5	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	324,673,692	228,280,000	325,000,000	135,000,000	200,000,000	250,000,000	218,880,000	97,164,000	74,000,000	67.42%	42.56%	22.77%
6	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	-	61,270,000	630,000,000	283,450,000	300,000,000	350,000,000	266,993,920	390,820,640	203,310,000	0.00%	637.87%	32.27%
7	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	-	250,000,000	-	-	280,000,000	295,000,000	-	144,836,000	-	0.00%	57.93%	0.00%
8	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	-	17,400,000,000	17,600,000,000	1,747,000,000	24,000,000,000	25,000,000,000	879,785,320	2,414,090,080	1,179,135,620	0.00%	13.87%	6.70%
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	540,596,648	534,285,000	540,000,000	-	-	-	612,516,000	277,846,000	-	113.30%	52.00%	0.00%
10	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	805,500,000	1,000,000,000	1,100,000,000	2,100,000,000	2,300,000,000	788,442,600	764,262,000	636,810,000	0.00%	94.88%	63.68%
11	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	-	694,430,000	700,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	492,591,000	-	0.00%	70.93%	0.00%
12	Kegiatan : Pelayanan SIM Gratis	-	-	-	-	2,600,000,000	2,600,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%

No	Urusan/ Program/ Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio Capaian Tahun ke-		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	<b>Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi</b>												
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	2,271,722,612	1,671,000,000	1,422,000,000	888,100,000	1,447,000,000	1,670,000,000.00	546,555,000	1,989,582,300	842,932,000	24.06%	119.07%	59.28%
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	682,000,000	2,120,000,000	4,980,000,000	895,560,000	1,220,000,000	1,200,000,000	1,799,443,000	846,092,231	549,394,400	263.85%	39.91%	11.03%
17	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	1,500,000,000	1,985,000,000	-	3,850,000,000	-	3,500,000,000	1,428,639,000	1,771,606,000	-	95.24%	89.25%	0.00%
18	Kegiatan : Pengecatan Marka	2,635,880,000	1,234,000,000	1,520,500,000	817,100,000	1,495,000,000	1,000,000,000	633,260,813	1,565,117,500	862,085,130	24.02%	126.83%	56.70%
19	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam		6,785,000,000	3,920,000,000	2,311,000,000	4,720,000,000	5,500,000,000	3,543,994,260	2,547,336,887	2,760,796,450	0.00%	37.54%	70.43%
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)		1,121,000,000	1,300,000,000	-	-	-	-	-	-			
21	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	419,459,267	4,387,150,000	1,635,000,000	326,330,000	1,455,000,000	1,540,000,000	-	1,801,833,000	503,648,090	0.00%	41.07%	30.80%
22	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	349,000,000	340,000,000	313,300,000	280,000,000	110,000,000	-	339,179,031	129,686,325	0.00%	97.19%	38.14%
23	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	401,000,000	338,200,000	220,000,000	237,000,000	255,000,000.00	271,825,800	398,640,000	189,501,000	0.00%	99.41%	56.03%
24	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	-	1,259,930,000	875,000,000	300,000,000	400,000,000	450,000,000	312,050,000	783,715,000	-	0.00%	62.20%	0.00%
25	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	-	-	1,400,000,000	-	350,000,000	500,000,000	-	-	-	0.00%	-	-
	<b>Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas</b>												
26	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	2,000,000,000	7,885,000,000	7,672,000,000	3,465,000,000	4,500,000,000	4,000,000,000	3,720,309,900	7,216,668,656	2,785,404,000	186.02%	91.52%	36.31%
27	Kegiatan : Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	-	1,644,000,000	550,000,000	-	600,000,000	650,000,000	-	1,508,334,500	477,918,000	0.00%	91.75%	86.89%

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan**

Dalam pelaksanaan pelayanan sebelumnya dan evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Perhubungan dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana jalur dan simpul transportasi guna mendukung pergerakan barang di wilayah kota;
- b. Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi.
- c. Pengembangan pelayanan angkutan lingkungan di wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi pelayanan transportasi massal (BRT);
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan;
- e. Perlunya peningkatan penyuluhan dan pemeriksaan kendaraan di jalan, utamanya bagi kendaraan angkutan umum;
- f. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor bagi kendaraan-kendaraan wajib uji;
- g. Peningkatan pelayanan di terminal sehingga perlunya mendorong ketertiban angkutan penumpang umum.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Letak geografis kota Batam yang sangat strategis karena berada dekat dengan negara Singapura seharusnya menjadikan Batam sebagai kota yang dapat merujuk kemajuan transportasi yang ada dinegara tersebut. Karena Kota Batam diakui hampir seluruh kota-kota di Indonesia sebagai kota yg modern.

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi masyarakat baik di mainland maupun hinterland. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi masyarakat dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya jumlah ketersediaan dan kenyamanan angkutan umum untuk melayani masyarakat sehingga keberadaan kendaraan pribadi mengalami peningkatan yang signifikan yang tentunya menjadi masalah baru lagi yaitu kemacetan.
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah
3. Masih rendahnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya

pribadi/orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional

4. Masih rendahnya jumlah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas di kota Batam seperti *traffic light*, ATCS, marka, rambu, RPPJ, papan nama jalan dan paku jalan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan
5. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, karena mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
6. Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, sehingga Lalu lintas barang di dalam kota masih belum tertata dengan baik dan belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang
7. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi yang tersebut adalah :

***”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Dinas Perhubungan Kota Batam berada dalam misi ketiga yaitu ***Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa***, dan misi ke 6 yaitu ***Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam*** dimana Dinas Perhubungan harus mampu meningkatkan infrastruktur dibidang perhubungan baik mainland maupun

hinterland, baik orang maupun barang sehingga percepatan pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani.

Dinas Perhubungan Kota Batam dalam menunjang misi di bidang perhubungan harus mampu menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang selamat, lancar, aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi serta berkesinambungan dan ramah lingkungan di wilayah kota Batam dengan konsep dapat mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus bisa merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman dan merata.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus merujuk kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, kementerian perhubungan tahun 2015-2019 akan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan peningkatan kapasitas transportasi

dengan mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses pada masyarakat pengguna jasa transportasi, termasuk distribusi barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mewujudkan pembangunan sektor perhubungan antara lain, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri.

Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah

*“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”*

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
2. Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
3. IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Sedangkan untuk menselaraskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus merujuk pada visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau:

*“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal untuk menunjang visi Provinsi Kepulauan Riau”*

Misi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau:

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan sebagai penunjang sektor lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatkan aksesibilitas layanan perhubungan serta membuka isolasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan mutu pelayanan jasa perhubungan

Dalam pelaksanaan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tersebut dituangkanlah tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya Perencanaan Sistem Transportasi yang lebih efektif, tertib, lancar dan aman
2. Terwujudnya pengembangan sistim transportasi darat yang efektif, tertib, lancar dan aman.
3. Terwujudnya pengembangan sistim transportasi laut yang efektif, tertib, lancar dan aman.
4. Terwujudnya kesinambungan pelayanan transportasi udara dan terciptanya persaingan usaha di bidang angkutan udara
5. Terwujudnya pengembangan sistem telekomunikasi

Dalam menunjang visi dan misi Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Kota Batam harus dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya perhubungan yang profesional agar terwujud pelayanan prima.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Keterkaitan kondisi kota batam dengan perencanaan pembangunan aparatur sangatlah berkaitan, dan pada bab ini akan digambarkan bahwa Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di jalur pelayaran dunia internasional. Kota Batam berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara :

- 0°25'29"LU – 1°15'00"LU
- 103°34'35"BT – 104°26'04"BT

Berdasarkan RTRW kota batam 2004-2014, luas wilayah kota batam seluas 3.990,00 Km<sup>2</sup>, terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 pulau, 329 di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, Kota Batam berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Selatan : Kecamatan Senayang
- Sebelah Barat : Kecamatan karimun dan moro kabupaten karimun
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara

Terbentuknya pemerintah kota batam sebagai institusi eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan , menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap

permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lain nya dalam masyarakat.

Pemerintahan kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat administratif dipimpin oleh walikota yang berkedudukan setingkat dengan kabupaten / kotamadya Daerah tingkat II lainnya.

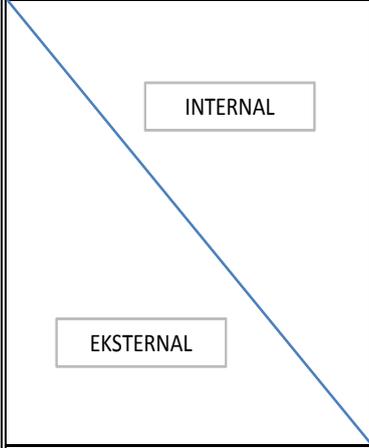
Keberadaan kotamadya Batam adalah merupakan implementasi atas dasar dekonstrasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah . Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah tersebut sebagai akibat berkembang nya daerah pulau batam untuk menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata.

Oleh sebab itu dengan adanya peningkatan status kecamatan batam yang dulunya termasuk wilayah kabupaten Daerah tingkat II . Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk pemerintahan kotamadya administrasi Batam, yang terdiri atas 3 kecamatan.

Sejak pulau batam dan beberapa pulau sekitarnya di kembangkan oleh pemerintah republik indonesia menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata serta dengan terbentuknya kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penigktan dimana dari hasil sensus penduduk rata-rata per tahunnya selama periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 8,1 persen.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**Tabel 3.1 Analisa SWOT**

	<p><b>KEKUATAN (STRENGTH)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Semakin besarnya kepedulian pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>* Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan</li> <li>* Dukungan perangkat organisasi yang solid</li> <li>* Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi</li> </ul>	<p><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kurangnya sarana dan prasarana kantor untuk dapat melaksanakan tupoksi masing-masing dengan lebih maksimal</li> <li>* Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum seimbangny pembagian beban kerja</li> <li>* Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal</li> <li>* Lemahnya kekuatan finansial daerah dalam mendukung program SKPD</li> </ul>
	<p><b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Letak geografis kota Batam yang strategis serta dikembangkannya Batam sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan seringnya kunjungan pemerintah pusat maupun daerah lain.</li> <li>* Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja</li> <li>* Tingginya dukungan masyarakat dan media informasi terhadap pelaksanaan pelayanan transportasi di kota Batam</li> <li>* Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Batam seiring dengan pertumbuhan industri</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S - O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan tupoksi</li> <li>* Meningkatkan koordinasi yang lebih intense dalam organisasi</li> <li>* Meningkatkan sistem pelayanan jasa transportasi yang lebih prima</li> </ul>
<p><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas</li> <li>* Kebijakan yang tidak konsisten dan berkelanjutan dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja</li> <li>* Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Batam seiring dengan pertumbuhan industri</li> <li>* Adanya dualisme kepemimpinan terutama dalam bidang transportasi di kota Batam</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S - T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan program sosialisasi peraturan lalu lintas kepada masyarakat</li> <li>* Menerapkan kebijakan yang lebih konsisten</li> <li>* Meningkatkan program kunjungan dan penyerapan aspirasi masyarakat hingga ke wilayah hinterland</li> <li>* Meningkatkan koordinasi antar instansi</li> </ul>	<p><b>STRATEGI W - T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan pendidikan dan bimbingan teknis kepada aparatur</li> <li>* Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kantor</li> <li>* Menerapkan sistem reward dan punishment yang seimbang dan</li> </ul>

Isu-isu Strategis :

1. Penyediaan fasilitas transportasi baik untuk keperluan rutin, sosial dan niaga tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang ada di Batam;
2. Masih relatif kurangnya kualitas SDM dan kemampuan teknis bidang perhubungan yang relatif rendah;
3. Fasilitas pendukung kegiatan / fasilitas sarana dan prasarana kerja antara lain ruang kerja, meubeller, kendaraan operasional yang belum memadai;
4. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang belum dibarengi dengan sistem pengendalian jumlah kendaraan yang handal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mentaati ketentuan / aturan lalu lintas baik bersifat dokumen maupun tingkah laku di jalan;
6. Belum adanya suatu sistem (perencanaan dan implementasi) transportasi terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan beberapa Instansi/Dinas/Lembaga terkait;
7. Kondisi lalu lintas yang semrawut dan kurang tertata, termasuk didalamnya penanganan perparkiran di daerah pusat perdagangan (*Central Business Distric Area*) dan daerah pelabuhan laut, disekitar kawasan industri dan kawasan permukiman;
8. Masih kurangnya angkutan massal yang murah dan aman seperti angkutan khusus taksi argo;
9. Masih terbatasnya sarana angkutan umum dan prasarana transportasi seperti terminal antar moda dan intermoda, halte-halte, tempat pemberhentian angkutan umum (*bus stop*), transfer point, trotoar untuk pejalan kaki dan sepeda, rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan dan jembatan penyeberangan;

10. Masih terbatasnya angkutan masal yang cepat dan nyaman (*Bus Rapid Transport*) antar wilayah/kawasan;
11. Masih terbatasnya sarana angkutan antar pulau yang aman, nyaman, cepat dan terjadwal;
12. Belum tersedianya angkutan lalu lintas laut khusus untuk daerah-daerah wisata.
13. Masih rendahnya jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kendaraan (*keur*);
14. Masih banyaknya angkutan umum yang belum memadai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
15. Masih lemahnya manajemen pengelolaan perparkiran;  
Sarana dan prasarana angkutan laut antar pulau belum memadai dan tingkat keselamatan relatif masih kurang
16. Sarana dan prasarana transportasi darat maupun laut belum memadai dan perlu dikembangkan angkutan antar moda yaitu keterpaduan antar angkutan darat dan laut sebagai pendukung pengembangan pulau – pulau di sekitarnya dan menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI DAN TARGET KINERJA TUJUAN		REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2016	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	1. Persentase titik Parkir yang sudah dikelola	47%	87%	47%	50%	83%	81%	83%	87%
			2. Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	-	90%	-	36%	34%	85%	90%	90%
3.	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	1. Persentase layanan angkutan darat dan laut	-	65.00%	-	46%	52%	56%	60.00%	65.00%
4.	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	40%	65%	40%	60%	61%	59%	65%	65%
			2. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	-	60%	-	19%	20%	40%	50%	60%
5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	1. Tersedianya Dermaga	-	100%	-	33%	50%	85%	90%	100%
			2. Tersedianya kapal penyeberangan	67%	100%	67%	50%	100%	89%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Sistem Transportasi yang Berkualitas di kota Batam		
<b>MISI 1 : Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	1. Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional	Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur dalam pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
<b>MISI 2 : Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan transportasi yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	1. Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Penataan manajemen Perparkiran	Mengembangkan sistem perparkiran yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai
		Meningkatkan keamanan , keselamatan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan transportasi umum	Meningkatkan strategi Lalu Lintas yang mampu menunjang ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi
2. Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	1. Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum
3. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	1. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Pembangunan dan pemeliharaan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	Pemerataan Pembangunan hingga di hinterland
<b>MISI 3 : Mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah hinterland</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	Pemerataan Pembangunan hingga di hinterland

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)			
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)
I	Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																
			Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	persentase	100%	100	2,749.44	100	3,738.29	100	3,110.53	100	4,777.68	100	5,000.00	100	5,500.00	100	24,875.94
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana</b>																
			Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persentase	100%	100	1,520.28	100	1,599.81	100	1,675.47	100	1,861.47	0	0.00	0	0.00	100	6,657.03
			Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persentase	100%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	2,150.00	100	2,300.00	100	4,450.00
			Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	persentase	100%	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	100	350.00	100	400.00	100	750.00
II	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	<b>Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas</b>	<b>1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola</b>																
			Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	Lokasi	188	94.67%	879.79	420	2,414.09	482	1,179.14	471	1,747	552	24,000	578	25,000	578	55,219.54

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)		
				2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan																
			Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kali Razia KBM	253	48	218.88	48	97.16	28	74.00	48	135.00	48	200.00	48	250.00	268	975.04
			Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	Kali Pengawasan Lalin	365	365	266.99	365	390.82	365	203.31	365	283.45	365	300	365	350	2,190	1,794.57
			Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	orang Peserta	30	-	0	40	144.836	0	0	0	0	50	280	50	295	140	719.84
			Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	orang Peserta	400	96%	612.52	450	277.85	-	0	0	0	-	0	-	0	450	890.37
			Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	persentasi	100%	100	788.44	100	764.262	100	636.81	100	1,100	100	2,100	100	2,300	100	7,689.51
			Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	event	46	0	0	20	492.591	0	0	0	0	20	300	20	300	60	1,092.59
			Kegiatan : Pelayanan SIM Gratis	terlaksananya pemberian SIM Gratis	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	2600	5000	2600	10,000	5,200.00
III	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	<b>Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal</b>	<b>Persentase layanan angkutan darat dan laut</b>																
			Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	penumpang koridor	0.97 Juta	0.97 Juta	17,905.26	2.019 Juta	17,683.73	2.388 juta	17,420.17	2,400 Juta	9,758.84	2,615 Juta	11,000.00	3 Juta	12,000.00	3 Juta	85,768.00
			Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	penumpang	240,240	-	0.00	778	1,375.21	2273	1,279.44	2,500	1,941.42	2,500	2,500.00	2,550	3,000.00	2550	10,096.07

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)		
			Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	penumpang	37,440	-	0.00	20280	1,730.85	2400	2,216.62	2400	1,621.16	2400	2,500.00	2400	2,800.00	2400	10,868.63
			Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	persentase	100	-	0.00	100%	5,395.79	138	8,049.00	100	15,000.00	100	15,000.00	100	17,000.00	100	60,444.79
IV	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	<b>Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi</b>	<b>1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun</b>																
			Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Unit	752	152	546.55	100	1,989.58	100	842.93	150	888.10	200	1,447.00	200	1,670.00	902	7,384.16
				Terbangunnya Rambu Parkir	Unit	-	0		0		0		80		80		80		240	
				Terbangunnya Rambu Type F	Unit	-	0		0		14		10		10		10		44	
				Terbangunnya RPPJ	Unit	70	22		5		10		6		6		6		55	
				Terbangunnya Guardrail	m'	865	263		500		250		0		250		250		1513	
				Terbangunnya Canstin/ Kerb	m'	13530	3000		8,000		0		1500		2000		2000		16500	
				Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	m'	1600	170		0		125		0		0		250		545	
				Terbangunnya Cermin Tikungan	Unit	16	5		3		14		0		4		4		30	
				Terbangunnya Papan Nama Jalan	Unit	507	0		100		150		0		100		50		400	
			Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Unit	128	0	1,799.44	0	846.09	0	549.39	6	895.56	10	1,220.00	8	1,200.00	24	6,510.48
				Terbangunnya Shelter/Halte Umum	Unit	20	30		3		0		0		0		0		33	
				Terbangunnya Transfer Point	Unit	2	2		1		0		1		1		1		6	
				Terbangunnya Pedestrian	m'	0	0		0		200		0		0		200		400	
				Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte	Unit	26	18		4		4		0		0		0		26	
				Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	Unit	2	0		3		4		0		2		0		9	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)		
			Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Unit	6	1	1,428.64	1	1,771.61	0	0	1	3,850	0	0	1	3,500.00	4	10,550.25
			Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	M2	16450	1500	633.26	3,000	1,565.12	1,150	862.085	800	817.10	800	1,495.00	500	1,000.00	7750	6,372.57
				Terbangunnya Pita penggaduh	M2	7302	1150		2,000		1,150		800		1000		1000		7100	
				Terbangunnya Zebra cross	M2	5620	1150		2,000		1,150		800		2000		2000		9100	
				Terbangunnya Marka parkir	M2	5720	1000		1,400		200		800		1000		500		4900	
				Terbangunnya ZoSS	Lokasi	2	0		1		1		1		1		1		5	
			Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	pengoperasian dan pemeliharaan Traffic Light ATCS dan non ATCS	Simpang	38	38	3,543.99	38	2,547.34	35	2,760.80	35	2,311.00	44	4,720.00	46	5,500.00	236	21,383.13
				Terbangunnya ATCS	Simpang	23	4		2		0		2		2		12			
				Terbangunnya Warning Light	Unit	8	5		5		0		0		0		10			
				Terbangunnya Display Info	Unit	12	12		0		2		0		2		16			
				Relokasi Traffic Light	Simpang	2	2		2		4		0		2		12			
			Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Unit	30	0	0	4	863.91	0	0	0	0	0	0	0	4	863.91	
			Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Dokumen	17	0	312.05	6	783.715	0	0	2	300	2	400	2	450	12	2,245.77
			Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	350	2	500	4	850.00	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
				<b>2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara</b>																
			Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya rehab dan pemeliharaan SBNP	Unit	30	0	0	0	1,801.83	4	503.65	0	326.33	2	1,455.00	2	1,540	8	5,626.81
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Pos Pelabuhan	Unit	18	0		5		4		2		5		5		21	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Ponton	Unit	5	0		0		2		1		1		1		1	5
			Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Halte Trans Batam	Unit	128	0	0	50	339.18	30	129.69	30	313.30	30	280.00	20	200.00	160	1,262.17
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Shelter/Halte Umum	Unit	20	2		0		0		0		0		0		2	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Transfer Point	Unit	2	0		0		0		1		1		1		3	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Terminal	Unit	0	0		1		0		0		1		0		2	
			Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	Unit	300	0	271.83	150	398.64	45	189.501	30	220.00	30	250.00	30	280.00	285	1,609.97
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan RPPJ	Unit	50	0		30		15		10		5		5		65	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Guardrail	m'	450	0		1310		0		0		0		0		1,310	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Canstin/Kerb	m'	5000	0		5000		150		500		500		500		6,650	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Pagar Pemisah	m'	0	0		0		0		0		200		400		600	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Cermin Tikungan	Unit	2	0		0		0		2		0		2		4	
				Terlaksananya rehab dan pemeliharaan Papan Nama Jalan	Unit	200	0		0		0		0		0		20		20	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR	
							2016		2017		2018		TAHUN-3 (2019)		TAHUN-4 (2020)		TAHUN-5 (2021)		TARGET	TOTAL DANA (Juta Rp)
							TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)	TARGET	DANA (Juta Rp)		
V	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran																
			Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	terbangunnya Dermaga	Unit	25	3	3,720.31	2	7,216.69	1	2,785.40	1	3,465.00	1	4,500.00	1	5,000.00	9	26,687.40
				Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota																
			Kegiatan : Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	terbangunnya Kapal	Unit	4	0	0	3	1,508.33	5	477.92	0	0	2	600	2	650	12	3,236.25
							37,197.67		57,737.33		44,945.86		51,611.93		84,997.00		95,885.00		372,374.78	

Batam, Desember 2018  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Rustam Efendi, SE., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19660402 198807 1 001

## PENUTUP

Disusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2016 - 2021 ini adalah merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dalam periode 2016 - 2021. Dalam pelaksanaannya, tetap mempertimbangkan ketersediaan sumber dana (anggaran) Pemerintah Kota Batam. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Untuk sempurnanya pencapaian kinerja program-program pembangunan Dinas Perhubungan periode 2016 - 2021, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama periode 2011 - 2016 tersebut senantiasa selalu diupayakan untuk di cari solusinya. Agar dapat berjalannya program dan kegiatan dengan baik, maka sangat dibutuhkan kerjasama khususnya dari seluruh jajaran pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam. Juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya sehingga seluruh tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas dapat dihadapi secara bersinergi.

Sangat diharapkan bahwa apa yang dicita-citakan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Batam yang tertuang di dalam visinya, yaitu: ***Mewujudkan Sistem Transportasi yang Modern di Kota Batam*** dapat berjalan dengan selaras dengan rencana Kota Batam untuk menciptakan ***”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***.